

SINOPSIS

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 dan PP Nomor 38 tahun 2007 menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib oleh pemerintahan daerah. Berdasarkan data KP4K, pada tahun 2013, ada 34 desa yang menyandang status rawan pangan pada Kabupaten Kulonprogo. Selanjutnya pada tahun 2016, Berdasarkan data yang diterima Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, masih ada Sebanyak 20 desa di Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan masih rawan terjadi kekurangan pangan. Daerah yang paling terkena dampak rawan pangan berada di Kulonprogo, sebanyak 9 desa. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan Kabupaten Kulon Progo sebagai objek penelitian dan ingin mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Kulon Progo pada masa kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo dan faktor apa yang paling berpengaruh.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya menganalisis data dan hasil wawancara dengan pengamatan. Wawancara dilakukan pada 2 dinas, 1 kantor dan 7 masyarakat asli Kabupaten Kulon Progo.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Kulon Progo pada masa kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo sangat baik dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ketahanan pangan Kabupaten Kulon Progo pada masa kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo yaitu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggap Pangan penting sehingga sudah berbicara Kemandirian Pangan dengan kebijakan dan program yang di buat pro ketahanan pangan dan masyarakat, kerjasama yang baik antar SKPD, komunikasi dan kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat dan stakeholder yang sangat baik sehingga stabilitas pangan terjaga, strategi dengan mengikuti pola tanam masyarakat, setiap tahun menambah anggaran untuk mengatasi permasalahan pangan dan mempermudah akses pangan dengan menyediakan fasilitas untuk masyarakat dan menyediakan pasar bagi petani dan faktor yang paling mempengaruhi yaitu komunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merumuskan beberapa saran yang diajukan kepada berbagai pihak terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu KP4K tidak hanya berada pada tataran eselon 3 karena Kabupaten Kulon Progo sangat memerlukan itu, Pemerintah tidak lagi mengalihkan fungsi lahan, bentuk kerjasama untuk pendistribusian produk olahan pangan lokal alangkah lebih baiknya dibukakan toko khusus, harus lebih mensosialisasikan program pangan kepada masyarakat, Pemerintah harus benar-benar membuktikan komitmennya dengan pemberian benih-benih yang berkualitas, berupaya lagi untuk meningkatkan kualitas beras RASKIN dan harus benar-benar mengawasi pembagian beras RASKIN agar tidak ada pungutan liar.